

BAB I

PENDAHULUAN

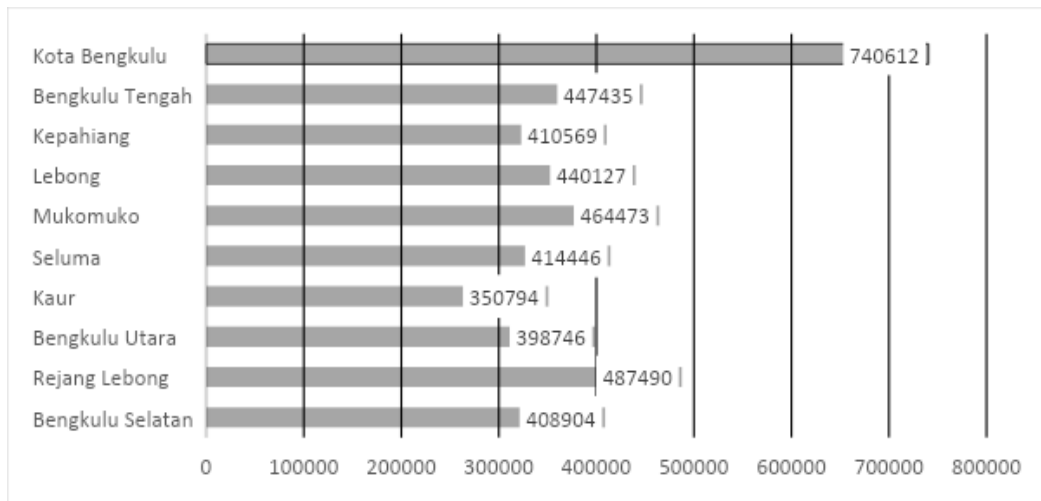
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan klasik di setiap negara berkembang. Indonesia sejak dahulu belum dapat mengangkat rakyatnya dari zona kemiskinan. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga sekarang ini. Secara umum Badan Pusat Statistika (BPS) membagi kemiskinan kedalam dua kategori yaitu, kemiskinan makanan dan kemiskinan non-makan. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin makan adalah mereka yang tidak mampu menanggung biaya makan selama satu bulan dari pendapatan mereka. Kebutuhan makan selama satu bulan setara dengan kebutuhan 2100 kilo kalori satu hari. Kebutuhan komoditi dasar untuk memenuhi kebutuhan diwakili oleh 52 jenis komoditas seperti padi-padian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran). Seseorang atau sekelompok masyarakat yang masuk kedalam kategori kemiskinan non-makan adalah kelompok yang belum mampu memenuhi kebutuhan berupa perumahan, pendidikan, kesehatan dll. Komoditas ini diwakili oleh 51 jenis di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Di Indonesia, provinsi termiskin pada tahun 2022 adalah Papua. Kemiskinan di Indonesia sebagian besar dialami oleh provinsi-provinsi di luar pulau Jawa. Indonesia timur dan Sumatera menjadi wilayah penyumbang provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu faktor yang seringkali menjadi rujukan utama kemiskinan di Indonesia adalah akses pembangunan yang belum

merata. Pembangunan yang terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

Di Indonesia timur secara umum pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia memang belum merata. Berbeda halnya dengan di Indonesia bagian barat, khususnya pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia di Sumatera jauh lebih berkembang. Pembangunan ini tidak terlalu berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera selatan masuk kedalam golongan provinsi termiskin di Indonesia. Secara geografis ketiga provinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kemiskinan di Aceh dan Sumatera Selatan cenderung tinggi di wilayah pedesaan. Berbeda halnya dengan kemiskinan di Bengkulu, dimana kemiskinan tertinggi terjadi di wilayah perkotaan.



Gambar 1. 1 Data Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Bengkulu 2022

Kota Bengkulu menjadi wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di Provinsi Bengkulu, dimana jumlahnya mencapai 740.612 jiwa. Faktor ekonomi

yang diindikasikan berpengaruh pada kemiskinan di Bengkulu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, perekonomian menjadi tulang punggung pemerintahan. Ekonomi yang menjadi tulang punggung pemerintahan perlu dijaga. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdampak pada semua elemen masyarakat selalu diupayakan. Upaya untuk mendorong ekonomi adalah upaya jangka panjang yang tujuannya juga jangka panjang. Saat ini kemiskinan yang terjadi diindikasikan karena pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi faktor lain yang diindikasikan menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan adalah rendahnya upah minimum. Sejalan dengan ekonomi upah minimum sebagai sumber pendapatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan kemiskinan.

Tingkat pendidikan juga turut menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Semakin baik pendidikan seseorang maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih tinggi. Kemudahan akses terhadap pekerjaan akan menekan angka kemiskinan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga turut andil dalam mempengaruhi kemiskinan. IPM menjadi tolak ukur kemampuan seseorang dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan ekonomi turut serta menjadi indikator yang dapat melihat kondisi kemiskinan di suatu wilayah.

Secara umum beberapa variabel di atas yang diindikasikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Bengkulu. Secara umum kemiskinan yang terjadi di

provinsi lain berfokus pada kemiskinan pedesaan, sebaliknya kemiskinan di Bengkulu terjadi perkotaan. Kemiskinan di Bengkulu menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengangkat judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu*”. Ruang lingkup penelitian ini adalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2011-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian di atas, selanjutnya disusun rumusan permasalahan yang akan dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu?
4. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu?
5. Bagaimana pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu?

1.3 Tujuan penelitian

Berangkat dari konteks dan fenomena di atas maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu.

2. Mengkaji dampak upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu.
3. Mengkaji dampak tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu.
4. Mengkaji dampak jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu.
5. Mengkaji dampak IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kesimpulan dari kajian ini dapat menjadi refresi akademik. Selain itu yang memperkuat kajian-kajian serupa yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber kajian yang mampu berkontribusi untuk memperkuat kebijakan yang akan dilaksanakan, kelangsungan kebijakan yang menyangkut tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.